

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**Jalan Jend. Sudirman No. Telp./Fax. (0742) 22021
Email.p3ap2kbbkabtanjabbarat@gmail.com
Kuala Tungkal**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 telah selesai disusun sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisikan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhirnya kami berharap agar Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Kuala Tungkal, Juli 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



DENIS MUHAMMAD YUNUS

Pembina Utama Muda

NIP. 19680417 198810 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2023	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
Bab III Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Rencana Kerja Perangkat Daerah	26
3.3 Program dan Kegiatan	29
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	38
Bab V Penutup	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah yang defenitif, dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor:40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2023

1. Maksud :

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

2. Tujuan :

Tujuan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan

3. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan Dinas dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang, landasan hukum penyusunan rencana kerja, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

Berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, Review terhadap RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, menyampaikan usulan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi evaluasi capaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis, menguraikan kegiatan-kegiatan yang targetnya belum tercapaian pelayanan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Evaluasi Rencana Kerja menyajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan dan target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun sebelumnya. Dilakukannya evaluasi pelaksanaan rencana kerja pada tahun sebelumnya, selain akan didapat persentase pencapaian kinerja dari target yang ditentukan, juga hambatan atau permasalahan yang mungkin timbul yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan dan sejauhmana program dan kegiatan tersebut merupakan prioritas pencapaian kebutuhan yang diinginkan dalam masyarakat. Dengan adanya evaluasi tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun berikutnya diharapkan menjadi lebih baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2021 melaksanakan 7 (tujuh) program 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan, dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun dana yang dikelola oleh dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB tahun anggaran 2021 sebesar Rp. **10.776.031.692,-** realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. **9.805.532.832,-** atau **90,99%** dan bersumber dari dana APBD dan DAK. Dengan demikian pagu anggaran untuk 7 (tujuh) program dan 25 sub kegiatan yang ditetapkan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disajikan dalam **Tabel TC.29** berikut:

FORMULIR E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNGPUNJAB BARAT
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II (APRIL S/D JUNI 2023)

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2023		REALISASI KINERJA PADA 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				K	Satuan	K	Rp	K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	%	12.479.770.442	100%	509.296.441	100%	927.984.786	27%	251.809.994	39%	239.499.800	-	-	100%	491.309.794	100%	1.000.606.235	8,02	0,08	Sekretaria Dinas P3AP2KB	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	14	Dokumen	254.100.000	18	15.000.000	14 Dok	35.647.000	4 Dok	9.775.000	3 Dok	11.430.000	-	-	4	21.205.000	22	36.205.000	1,22	0,14	Sekretariat DP3AP2KB	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	1	Laporan	742.470.000	1	121.440.000	1	181.780.000	1	35.780.000	1	54.160.000	-	-	1	89.940.000	2	211.380.000	2,00	0,28	Sekretariat DP3AP2KB	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kartu Inventaris Barang Milik Daerah	5	Kartu Inventaris	88.500.000	5	-	5	-	0	-	0	-	0%	-	5	-	10	-	2,00	-	Sekretariat DP3AP2KB	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai	100	Persen	533.650.000	100	33.500.000	100	27.500.000	0	-	0	-	-	-	100	-	100	33.500.000	6,28	0,06	Sekretariat DP3AP2KB	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100	%	2.510.418.092	100	131.689.091	100	297.804.786	21,88	118.791.884	43,6	90.913.036	-	-	100	209.704.920	100	341.394.011	1,00	0,14	Sekretariat DP3AP2KB	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan OPD	33	Unit	5.350.700.000	42	-	33	58.215.000	-	-	8	26.912.000	-	-	33	26.912.000	75	26.912.000	1,79	0,01	Sekretariat DP3AP2KB	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	2.063.125.000	100	146.500.000	100	186.590.000	21,8	41.204.510	43,78	40.492.764	-	-	100	81.697.274	-	228.197.274	-	0,11	Sekretariat DP3AP2KB	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	48	unit	936.807.350	48	61.167.350	48	140.448.000	10	46.258.600	3	15.592.000	-	-	48	61.850.600	48	123.017.950	1,00	0,13	Sekretariat DP3AP2KB	
	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender, peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	60	%	3.798.292.100	10%	540.881.072	10%	569.545.700	10%	43.725.000	10%	89.021.000	-	-	10%	132.746.000	Unit	673.627.072	-	0,18	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	90	Lembaga PUG	664.960.608	15	59.450.870	15	70.000.000	0	3.000.000	0	3.800.000	-	-	15	6.800.000	15	66.250.870	1,00	0,10	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200	orang	2.877.897.642	200	461.430.432	200	479.649.300	0	38.250.000	100	75.940.000	-	-	200	114.190.000	400	661.399.582	2,00	0,23	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	5	Lembaga Layanan PP	255.433.850	5	19.999.770	5	19.896.400	5	2.475.000	1	9.281.000	-	-	5	11.756.000	-	36.549.540	-	0,14	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan pengaduan kekerasan	100%		1.127.429.750	100%	54.055.400	100%	66.757.200	100%	15.100.000	100%	13.000.000	-	-	100%	28.100.000	100%	87.030.400	1,00	0,08	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerahi Kabupaten	Jumlah perempuan korban kekerasan	-	-	27.429.750	-	54.055.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.030.400	-	1,61	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kasus	350.000.000	20	-	10	66.757.200	11	15.100.000	6	13.000.000	-	-	5	28.100.000	-	-	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan	24	unit layanan	750.000.000	24	-	24	-	24	-	24	-	-	-	24	-	-	-	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga	2%		130.000.000	2%	37.000.000	2%	39.999.960	2%	-	2%	-	-	-	2%	-	6%	37.000.000	3,00	0,28	Bid. Pemberdayaan Perempuan	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)				Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah				Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2023				REALISASI KINERJA PADA 2023				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Kerja PD Penanggung jawab						
				K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		Target			Rp		Target		Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	29	30	31	32
		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	200 Keluarga		40.000.000	200 Keluarga	-	200 Keluarga	-	200 Keluarga	-	200 Keluarga	-	200 Keluarga	-	200 Keluarga	-	200 Keluarga	-	200 Keluarga	-	200 Keluarga	-	600 Keluarga	-	3,00	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Hikeuarga	Jumlah pusat pelayanan keluarga	5 Pusat Layanan Keluarga		90.000.000	5 Pusat Layanan Keluarga	37.000.000	5 Pusat Layanan Keluarga	39.999.960	5 Pusat Layanan Keluarga		5 Pusat Layanan Keluarga		5 Pusat Layanan Keluarga		5 Pusat Layanan Keluarga		5 Pusat Layanan Keluarga		5 Pusat Layanan Keluarga		5 Pusat Layanan Keluarga		5 Pusat Layanan Keluarga		37.000.000	-	0,41	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	100%		20.000.000	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		1,00		Bid. Pemberdayaan Perempuan			
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profil Gender Kabupaten Tanjung Jabung	1 Profil Gender		20.000.000	1 Profil Gender		1 Profil Gender		1 Profil Gender		1 Profil Gender		1 Profil Gender		1 Profil Gender		1 Profil Gender		1 Profil Gender		1 Profil Gender		3 Profil Gender		3,00	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan			
	Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	54%		460.000.000	43%	73.187.500	46%	118.299.900	46%	4.750.000	46%	21.765.200										49%	26.515.200	54%	117.886.250	1,26	0,26	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	75 Lembaga PHA		260.000.000	55 Lembaga PHA	49.688.750	60 Lembaga PHA	94.629.800	0 Lembaga PHA	4.750.000	30 Lembaga PHA	21.765.200										65 Lembaga PHA	26.515.200	75 Lembaga PHA	94.387.500	1,36	0,36	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan	30 Sekolah		200.000.000	30 Sekolah	23.498.750	20 Sekolah	23.670.100	20 Sekolah		0 Sekolah										30 Sekolah		191 Sekolah	23.498.750	6,37	0,12	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak			
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memperoleh perlindungan khusus	27,30%		360.000.000	21,50%	29.652.500	23,90%	29.600.000	23,90%	3.000.000	23,90%	3.000.000										25,50%	6.000.000	27,30%	50.322.500	1,27	0,14	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	12 upaya pencegahan		130.000.000	4 upaya pencegahan	29.652.500	2 upaya pencegahan		2 upaya pencegahan		2 upaya pencegahan		2 upaya pencegahan									8 upaya pencegahan		12 upaya pencegahan	50.322.500	3,00	0,39	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	37 Orang		60.000.000	30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang									35 Orang		180 Orang		6,00	-	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	21 Unit layanan PA		170.000.000	13 Unit layanan PA		15 Unit layanan PA	29.600.000	0 Unit layanan PA	3.000.000	0 Unit layanan PA	3.000.000										17 Unit layanan PA	6.000.000	Unit Layanan PA		-	-	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		
	Terkendalinya	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,9		80.000.000	1,93	160.609.898	1,92	452.134.000	1,92	9.000.000	1,92	68.495.001										1,91	77.495.001	1,9	70.419.980	0,98	0,88	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan		
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan melaksanakan Grand Design Pengendalian Penduduk	100%			100%		100%		100%		100%											100%		100%		1				
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK		30.000.000	4 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	29.999.990	3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	39.934.000	0 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	9.000.000	0 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	9.000.000										3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	18.000.000	3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	53.999.980	0,75	1,80	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan		
		Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	3 Profil KKBP		50.000.000	3 Profil KKBP	130.609.908	3 Profil KKBP	412.200.000	0 Profil KKBP	0	3 Profil KKBP	59.495.001	0	0								3 Profil KKBP	59.495.001	3 Profil KKBP	16.420.000	1,00	0,33	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan		

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2023		REALISASI KINERJA PADA 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit Kerja PD Penanggung jawab		
				K	Satuan	K	Rp	K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Target	Rp.	Target	Rp.	14 = 13/5 x 100%				
				5		6		7		8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14	15									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15												
4	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	19,58%		8.717.405.632	19,67%	4.793.266.687	19,64%	2.559.958.800	19,64%	151.335.000	19,64%	280.287.500			0			19,62%	431.622.500	19,58%		1,00	-	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	21 Kali		879.300.250	22	881.860.176	22	1.619.800.000		82.000.000		165.337.500			0			21 Kali	247.337.500	21	1.221.609.476	0,95	1,39	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan dalam penyuluhan dan pergerakan program KKBPK	100%		1.843.000.000	100%	906.027.670	100%	292.414.800		63.000.000		63.000.000			0			100%	126.000.000	100%	1.467.627.670	1,00	0,80	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	20%		75.000.000	20%	2.646.932.100	100%	301.416.000	0%	4.085.000	0,06%	18.950.000			-			20%	23.035.000	20%	4.563.887.856	1,00	60,85	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat/ Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	100%		50.000.000	100%	358.446.741	100%	346.328.000	100%	2.250.000	0,09%	33.000.000			-			100%	35.250.000	100%	1.771.699.498	1,00	-	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	100%		2.952.000.000	100%	1.550.249.749	100%	1.839.583.000	0%	7.500.000	30%	12.603.000			-		100%	20.103.000	100%	1.771.699.498	1,00	0,60	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
		Pelaksanaan Pumbangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS	21 Poktan		590.000.000	21 Poktan	1.550.249.749	21 Poktan	1.839.583.000	0 Poktan	7.500.000	21 Poktan	12.603.000			-		21 Poktan	20.103.000	21 Poktan	1.771.699.498	1,00	3,00		
						30.124.897.924		7.748.199.247		6.603.863.346		486.219.994		727.671.501			-		-	1.213.891.495		3.808.591.935	18,52	2,50		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja pelayanan ada yang merupakan indikator kinerja utama dan ada yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kinerja pelayanan yang dilaksanakan merupakan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja setiap tahunnya.

Di bawah ini disajikan tabel target kinerja dan pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2023, sebagaimana tercakup pada **Tabel T.C. 30:**

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
08	Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)			87,0	87,5	88,5	89,0	85,68	85,79	88,5	89,0	Realisasi Capaian Triwulan II 2023
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)			68,5	69,0	69,5	70,0	68,31	73,20	69,5	70,0	
3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan		9	15	12	9	6	11,72	4,83	9	6	
4	Angka Perceraian			1,5	1,25	1,0	0,75	1,3	0,87	1,0	0,75	
5	Peringkat Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)			PRATAMA	MADYA	MADYA	NINDYA	PRATAMA	MADYA	MADYA	NINDYA	
14	Usuran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1	Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun		2,45	2,55	2,50	2,45	2,40	2,59	2,37	2,45	2,40	Realisasi Capaian Triwulan II 2023
2	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)			69	68	67	66	69	34,85	67	66	
3	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)			58,2	58,20	62,44	64,56	66,34	53,82	62,44	64,56	
4	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun		67,5	65,6	66,8	67,5	68,3	64,4	58,90	67,5	68,3	Realisasi Capaian Triwulan II 2023
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi/Unmeet-Need)		20,05	27,05	25,05	20,05	18,05	9,19	16,00	20,05	18,05	

Adapun Capaian Kinerja sebagaimana tersebut di atas sampai dengan kondisi Triwulan II Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam mencapai sasaran kinerja meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender, peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dapat diukur melalui capaian Indek Pembangunan Gender (IPG) dan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Tahun 2023 dengan target sebesar 88,5 dan target IDG sebesar 69,5. Pada kondisi triwulan IV tahun 2021 realisasi/capaian IPG diperkirakan masih sama dengan kondisi Tahun 2020 yaitu IPG sebesar 86,50 dan IDG sebesar 68,31. Penghitungan data IPG dan IDG adalah dikeluarkan oleh Kementerian PPPA. Untuk tahun 2021 data IPG dan IDG penghitungannya dilakukan pada tahun 2022, maka data tahun 2021 masih menggunakan data tahun 2020. IPG adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan atau menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG adalah merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun capaian terhadap IPG dan IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penghitungan oleh BPS, dengan komponen IPG antara lain (1) Angka Harapan Hidup, (2) Angka Harapan Lama Sekolah, (3) Rata-rata Lama Sekolah dan (4) Pengeluaran Per-kapita. Dan Komponen IDG antara lain (1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen, (2) Perempuan sebagai menejer, profesional, administrasi dan teknis serta (3) sumbangan perempuan dalam pendapatan.
2. Sasaran Kinerja meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak capaian indikatornya yaitu Persentase penurunan Ratio Kekerasan terhadap perempuan dari target 90% terealisasi 70% sehingga capaian pada triwulan IV Tahun 2021 ini adalah sebesar 77,78%. Artinya sampai dengan kondisi triwulan IV perempuan yang mengalami kekerasan berjumlah 15 orang dari total 15 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, sehingga diperoleh angka ratio kekerasan sampai dengan triwulan IV adalah 9(sembilan) dan terjadi penurunan kekerasan terhadap perempuan 70%.
3. Untuk indikator Status Capaian Kabupaten Layak Anak, Tahun 2021 target Skor 599 dan realisasi pada kondisi triwulan IV telah mencapai Skor 599, maka tingkat capaiannya 100% dan telah mencapai Kabupaten Layak Anak dengan kategori Pratama dengan skor 599. Tercapainya target inikarena Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mempunyai regulasi mengenai perlindungan dan pemenuhan

hak anak yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak kemudian adanya keterlibatan Forum Anak Daerah dalam mengikuti Musrenbang Tingkat Kabupaten, tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, tersedianya lembaga pengasuhan alternatif, semua Puskesmas sudah menjadi pelayanan ramah anak, serta 91,36% anak telah memiliki akta kelahiran, lebih dari 50% lebih Desa/Kelurahan telah memiliki Forum Anak dan PATBM yaitu Perlindungan anak Berbasis Masyarakat, kemudian 11 sekolah sudah ramah anak (6 SD, 3 SLTP, 2 SMA), selain itu telah tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga/LK3 dan Pusat Kreatifitas Anak.

4. Sasaran kinerja tahun 2021 adalah menurunnya laju pertumbuhan penduduk, capaian indikatornya yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan target 2,19% tahun 2021, maka kondisi triwulan IV LPP masih sebesar 2,03% masih sama dengan capaian LPP tahun lalu (2020 2,03%). Karena Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dapat dihitung pada awal tahun berikutnya yang dikeluarkan oleh BPS. Dalam upaya penurunan pertumbuhan penduduk pelaksanaan program pengendalian penduduk, program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan keluarga akan tetap ditingkatkan. Turunnya laju pertumbuhan penduduk ini berkorelasi positif terhadap angka kelahiran (*fertilitas*), angka kematian (*mortalitas*), migrasi masuk dan migrasi keluar serta signifikan terhadap pemakaian angka kontrasepsi (*CPR*), kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet-need*), dan angka keberlangsungan ber-KB.

Adapun dukungan program dan kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 ada 6 (enam) program strategis dan 12 kegiatan, 13 sub kegiatan, yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Masing-masing program dan kegiatan diharapkan mampu untuk mencapai hasil (*outcome*) dari pada sasaran dan indikator kinerja yang ada. Adapun program dan kegiatan Tahun 2021 adalah :

- I. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:

- * Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan output kegiatan, jumlah peserta pelatihan PUG target 25 orang dari Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 14.960.608,- Dengan realisasi keuangan Rp. 10.360.608,- dan fisik 100% yaitu pelatihan PUG.
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
 - * Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan output kegiatan jumlah organisasi wanita yang dilaksanakan peningkatan kapasitas yaitu DWP Kabupaten dan GOW target 200 orang, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 479.649.607,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 110.771.834.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
 - * Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan output kegiatan jumlah Desa yang dilaksanakan bimbingan manajemen usaha ekonomi perempuan dengan target 1 (satu) Desa, pagu anggaran sebesar Rp. 5.433.850,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 5.433.850,- (100%) dan fisik 100%.
- II. Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan yang dilaksanakan:
- a. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
 - * Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target Tahun 2021 sebanyak 30 kasus dan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 12 kasus atau tingkat capaian sebesar 40%. Pagu anggaran sebesar Rp. 27.429.750,- dan realisasi sebesar Rp.14.100.000,- atau 51,40%.

- III. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan kegiatan yang dilaksanakan:
- a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota, sub kegiatan yaitu:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, output sub kegiatan jumlah pengembangan Mdia KIE pemenuhan hak anak target kinerja 20 KIE, dengan pagu anggaran Rp. 22.050.744,- realisasi triwulan IV sebesar Rp. 18.350.744,- atau 83,22% dan fisik %.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
 - Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 22.909.925,- Output sub kegiatan jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina target 10 sekolah. Adapun realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp 3.000.000,-atau 13,09% dan fisik %
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 7.909.600,- realisasi triwulan IV belum ada.
- IV. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan yang dilaksanakan:
- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, sub kegiatan yaitu:
 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jejaring SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal, pagu anggaran Rp.31.439.875,- realisasi Rp. 31.439.875,- atau tingkat capaian keuangan 100 %. Dan fisik 100%.

- V. Program Keluarga Berencana (KB), kegiatan yang dilaksanakan:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, sub kegiatan yaitu:
 - Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, output sub kegiatan 3 Kampung KB dengan pagu anggaran Rp. 6.152.375,- Adapun realisasi anggaran sampai triwulan IV realisasi keuangan Rp. 6.152.375,- atau tingkat capaian 100% dan fisik 100%.
 - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), sub kegiatan yaitu:
 - Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), out sub kegiatan jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan kebutuhan PLKB, Non PNS untuk penguatan kapasitas program KKBPK, target satu kali monev dan 35 PLKB Non PNS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 262.405.632,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 133.075.632,- (50,71) dan fisik %.
 - Peningkatan penyediaan informasi data mikro program KKBPK di setiap Desa/Kelurahan Kewenangan Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp. 25.567.200,- realisasi Rp. 25.567.200,- atau tingkat capaian 100% dan fisik 100%.
 - c. Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan:
 - Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB, pagu anggaran sebesar Rp. 20.919.315,- realisasi keuangan belum ada.
 - d. Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:

- Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, output sub kegiatan jumlah akseptor KB yang mendapat pembinaan dan pelayanan KB target 600 akseptor KB, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.595.700,- realisasi sebesar Rp. 15.245.700,- tingkat capaian 53,31% dan fisik 50%.
- VI. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sub kegiatan yaitu:
 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS), output kegiatan jumlah kelompok kegiatan (Poktan) yang dibentuk/ direvitalisasi serta Kader yang dibina target 30 Kader dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.118.220, triwulan IV realisasi sebesar Rp. 16.118.220 atau tingkat capaian 53,51% dan fisik %.

Permasalahan dan Solusi :

A. Permasalahan:

Dalam pencapaian Indikator Kinerja utama yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 permasalahan yang ada sebagai berikut: .

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan masih kurangnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya SDM terlatih dalam rangka pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kurangnya anggaran operasional penjangkauan untuk pendampingan korban kekerasan tidak tersedia karena minimnya pagu anggaran, sedangkan kasus kekerasan sering terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka solusi yang dilaksanakan antara lain :

- 1 Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan

urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana maka Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, untuk itu perlu dukungan anggaran.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana tidak terlepas dari pelayanan terhadap masyarakat maupun perangkat daerah. Bidang urusan yang dilaksanakan yaitu urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Isu-isu strategis dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui program yang dilaksanakan secara komprehensif, haruslah menjadi komitmen dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, karena isu strategis adalah merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Secara garis besar isu-isu penting/strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat
3. Angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.
4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
5. Pernikahan usia anak masih relative tinggi
6. Angka Kelahiran Total (TFR) masih tinggi di atas angka Provinsi.
7. Kebutuhan ber-KB yang belum terlayani (unmet need).
8. Prevalensi stunting relative masih tinggi.
9. Bonus Demografi, proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun meningkat
10. Masih adanya angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR dan Kehamilan yang tidak diinginkan).
11. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga serta terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling

ketahanan keluarga dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak hingga kebahagiaan keluarga.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2023 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisa kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Telaahan terhadap Rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Review terhadap rancangan RKPD meliputi kegiatan prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Dinas. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 berpedoman pada renstra Tahun 2021-2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat didiskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah Lintas Sektoral Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembahasan yang dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang di Kecamatan. Pada Forum Perangkat Daerah ada usulan program atau kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari kelompok masyarakat dan Perangkat Daerah Kecamatan. Akan tetapi usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, tentang telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Provinsi, maka kebijakan nasional dan Provinsi dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- A. Terkait dengan pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian dan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam hal :
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini di ukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 3. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan di bagi jumlah perempuan di atas 18 tahun
 - a. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase Kabupaten/Kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan (100%) korban kekerasan.
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergisitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergisitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga masyarakat

5. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.

- B. Terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal pelayanan yaitu:

Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS(15-49 tahun)
2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
3. Meningkatnya indeks pembangunan keluarga

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Persentase pemakaian kontrasepsi.

1. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya kebutuhan ber-Kb yang tidak terpenuhi (unmet need)
- b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
- c. Meningkatnya dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 12-19 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator Kinerja utama yaitu Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 (ASFR 15-19 tahun)

3. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektifitas du Kependudukan dan KB

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat merujuk pada program dan kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2021-2026, dengan target kinerja untuk Tahun 2023. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **”Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, status Kabupaten Layak Anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi”**.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender
2. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatnya kualitas keluarga
4. Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak(KLA)
5. Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi

6. Meningkatnya ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB/KR)

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Perangkat daerah disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	KONDISI AWAL TAHUN (2020)	TARGET TAHUN 2023	SATUAN	SUMBER DATA	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	
1.	Terselenggaranya Tata Kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian Inspektorat (total dari nilai persepsi Perurusur dibagi total unsur terisi) dikali nilai penimbang	67,48	69,60	%	LHE AKIP Inspektorat	Non IKU	
				2. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83,81	85,00	%	Hasil Survey		
				3. Tingkat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Jumlah temuan dibagi jumlah yang ditindaklanjuti dikali 100%	100%	100%	%	LHP Inspektorat		
2.	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, status kabupaten layak anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2 Meningkatnya Kesetaraan Gender	4. Indek Pembangunan Gender (IPG)	IPM Perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100%	85,68	88,50	Indeks	Penghitungan Kementerian PPPA dan Provinsi	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
				5. Indek Pemberdayaan Gender (IDG)		Indeks keterwakilan diparlemen ditambah Indeks pengambil keputusan ditambah Indeks distribusi pendapatan dibagi 3 (tiga) dikali 100%	68,31	69,50			Indeks
		Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak	3 Meningkatnya perlindungan perempuan	6. Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jlh Perempuan korban kekerasan dibagi jlh.penduduk perempuan dikali 100.000	18	9	Rasio	Laporan Data Simponi di DP3AP2KB		
				4 Meningkatnya kualitas Keluarga	7. Angka perceraian	Jlh. Perceraian dibagi jumlah penduduk dikali 1000	1,69	1	Angka		Pengadilan Agama & DP3AP2KB
				5 Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak	8. Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kategori Penilaian: Pratama= 500-599 Madya = 600-699 Nindya= 700-799 Utama= 800-899 KLA = 900-1000	PRATAMA	MADYA	Peringkat		Data Laporan capaian indikator penilaian KLA dari OPD terkait
		Meningkatnya Indeks Pembanguna Keluarga	6 Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	9. Angka Total Kelahiran/ (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun	TFR= $5 \sum 7 = 1$ ASFR i ASFR=Jlh kelahiran per 1000 perempuan kelompok umur (15-19th) s/d 45-49th	2,59	2,45	Angka	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB		
				7 Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)	10 Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks ketentraman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3 (tiga) dikali 100%	66,34	62,44	%		Penghitungan BKKBN Provinsi
				11 Angka Kelahiran Remaja/ ASFR 15-19 (kelompok umur per 1.000 pada kelompok usia)	Jlh.kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 th dibagi jlh penduduk perempuan kelompok umur 15-19th pada pertengahan tahun yg sama dikali 100%	69	67	Angka	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB		
				10 Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jlh peserta KB Aktif dibagi jlh Pasangan Usia Subur(PUS) dikali 100%	64,4	67,5	%	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB		
				12 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlyani dibagi jumlah PUS dikali 100%	9,19	20,05	%	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB		

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, direncanakan terdiri dari 10 program 28kegiatan dan 69sub kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp.10.185.527.750,- dan mengusulkan pagu Perubahan sebesar Rp. 15.520.177.396,-

Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti yang tersaji pada tabel TC.33 berikut ini:

TABEL T.C-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KODE					RENJA 2023				RENJA PERUBAHAN 2023						
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN. SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SEBELUM PERUBAHAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
							2023					2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10 - 6	12				
					Nilai AKIP Perangkat Daerah		69,60				Nilai AKIP Perangkat Daerah	69,60			
					Rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		85,00				Rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00			
					Tingkat tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan		100%				Tingkat tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan	100%			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	6.443.880.143	5.028.321.254		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	5.985.457.438	957.136.184	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianaya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	14 Dokumen	153.502.000	35.647.000		Tersedianaya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	14 Dokumen	50.333.800	14.686.800	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	51.834.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	-	-	APBD
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	50.334.000	35.647.000	APBD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	50.333.800	14.686.800	APBD
2	8	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	51.334.000	-	APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	-	-	APBD
2	08	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	1 Laporan	4.269.086.368	4.282.116.468		Laporan Keuangan Tahunan OPD	1 Laporan	4.292.916.468	10.800.000	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	4.038.296.368	4.100.336.468	APBD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	4.100.336.468	-	APBD
2	08	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	219.790.000	181.780.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen	192.580.000	10.800.000	APBD
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	11.000.000	-	APBD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	-	-	APBD
2	08	0	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kartu Inventaris Barang Milik Daerah	5	16.500.000			Kartu Inventaris Barang Milik Daerah	5			
2	08	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	16.500.000	-	APBD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	-	-	APBD
2	08	0	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai	100 Persen	100.000.000	27.500.000		Tingkat Kehadiran Pegawai	100 Persen	32.000.000	4.500.000	
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	27.500.000	27.500.000	APBD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50 Paket	32.000.000	4.500.000	APBD
2	08	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	25.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	-	-	APBD
2	08	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	47.500.000	-	APBD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	-	-	APBD
2	08	0	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 %	467.513.775	297.804.786		Cakupan layanan administrasi umum	100 %	529.950.220	232.145.434	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.445.000	5.443.000	APBD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.443.000	-	APBD
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	52.646.000	37.335.436	APBD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	52.642.220	15.306.784	APBD
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	284 Paket	6.600.000	6.600.000	APBD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	284 Paket	20.300.000	13.700.000	APBD
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	166 Paket	24.722.775	20.772.700	APBD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	166 Paket	32.200.000	11.427.300	APBD
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.600.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	-	APBD
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	374.500.000	227.653.650	APBD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	419.365.000	191.711.350	APBD
2	08	0	2.07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan OPD	33	880.550.000	58.215.000		Jumlah BMD penunjang urusan OPD	33	697.422.950	639.207.950	
2	08	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	100.000.000	-	APBD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	-	-	APBD
2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	-	APBD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN. SUB KEGIATAN	RENJA 2023					RENJA PERUBAHAN 2023				
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SEBELUM PERUBAHAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	RENCANA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10 - 6	12				
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	55.550.000	31.300.000	APBD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	154.541.000	123.241.000	APBD
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	75.000.000	26.915.000	APBD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	410.281.950	383.366.950	APBD
2	08	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-
2	08	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	-	APBD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	132.600.000	132.600.000	APBD
2	08	0	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	383.750.000	186.590.000		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	210.590.000	24.000.000	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	2.750.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.750.000	-	APBD
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000	36.000.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48.000.000	12.000.000	APBD
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	345.000.000	147.840.000	APBD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	159.840.000	12.000.000	APBD
2	08	0	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	48 unit	172.978.000	140.448.000		Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	48 unit	172.244.000	31.796.000	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	56.654.000	42.352.000	APBD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	56.650.000	14.298.000	APBD
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	89.994.000	72.496.000	APBD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	89.994.000	17.498.000	APBD
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	11.330.000	11.190.000	APBD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	11.190.000	-	APBD
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	15.000.000	14.410.000	APBD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	14.410.000	-	APBD
2	8	2			PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	10%	659.649.607	569.545.700		Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	10%	954.315.800	384.770.100	
2	8	2	201		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	15 Lembaga PUG	130.000.000	70.000.000		Jumlah Kelembagaan PUG	15 Lembaga PUG	70.000.000	-	
2	8	2	201	1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	20.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	-	-	APBD
2	8	2	201	3	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	40.000.000	-	APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	-	-	APBD
2	8	2	201	4	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	70.000.000	70.000.000	APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	70.000.000	-	APBD
2	8	2	202		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 orang	479.649.607	479.649.300		Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 orang	834.365.800	354.716.500	
2	8	2	202	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	479.649.607	479.649.300	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	834.365.800	354.716.500	APBD
2	8	2	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	5 Lembaga Layanan PP	50.000.000	19.896.400		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	5 Lembaga Layanan PP	49.950.000	30.053.600	
2	8	2	203	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	50.000.000	19.896.400	APBD	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	49.950.000	30.053.600	APBD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN. SUB KEGIATAN	RENJA 2023					RENJA PERUBAHAN 2023				
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SEBELUM PERUBAHAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	RENCANA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10 - 6	12				
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan	100%	220.000.000	66.757.200	-	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan	100%	93.337.100	26.579.900	
2	8	3	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Jumlah perempuan korban kekerasan	-	-	-	-	Jumlah perempuan korban kekerasan	-	-	-	-
2	8	3	201	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	-	-	-	-	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan	-	-	-	-
2	8	3	202		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan	10 Kasus	70.000.000	66.757.200	-	Jumlah perempuan korban kekerasan	10 Kasus	93.337.100	26.579.900	
2	8	3	202	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Layanan	70.000.000	66.757.200	APBD	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Layanan	93.337.100	26.579.900	APBD
2	8	3	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan	24 unit layanan	150.000.000	-	-	Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan	24 unit layanan	-	-	-
2	8	3	203	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	100.000.000	-	APBD	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 orang	-	-	APBD
2	8	3	203	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	50.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	-	-	APBD
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga	2%	130.000.000	39.999.960	-	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga	2%	69.998.800	29.998.840	
2	8	4	201		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	200 Keluarga	40.000.000	-	-	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	200 Keluarga	-	-	-
2	8	4	201	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	40.000.000	-	APBD	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	-	-	APBD
2	8	4	202		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat pelayanan keluarga	5 Pusat Layanan Keluarga	90.000.000	39.999.960	-	Jumlah pusat pelayanan keluarga	5 Pusat Layanan Keluarga	69.998.800	29.998.840	
2	8	4	202	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	20.000.000	-	APBD	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	-	-	APBD
2	8	4	202	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	70.000.000	39.999.960	APBD	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	69.998.800	29.998.840	APBD
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	100%	20.000.000	-	-	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	100%	-	-	
2	8	5	201		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung	1 Profile Gender	20.000.000	-	-	Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung	1 Profile Gender	-	-	-
2	8	5	201	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	20.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Dokumen	-	-	APBD
2	8	6			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	46%	440.000.000	118.299.900	-	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	46%	368.082.700	249.782.800	
2	8	6	201		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	60 Lembaga PHA	240.000.000	94.629.800	-	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	60 Lembaga PHA	344.412.600	249.782.800	
2	8	6	201	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	110.000.000	94.629.800	APBD	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	271.664.600	177.034.800	APBD
2	8	6	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	130.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	72.748.000	72.748.000	APBD
2	8	6	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan	20 Sekolah	200.000.000	23.670.100	-	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan	20 Sekolah	23.670.100	-	-
2	8	6	202	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	6000 Orang	50.000.000	-	APBD	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	6000 Orang	-	-	APBD

URUSAN	KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN. SUB KEGIATAN	RENJA 2023				RENJA PERUBAHAN 2023				BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	KEBUHTUAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SEBELUM PERUBAHAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	RENCANA KEBUHTUAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10 - 6	12				
2	8	6	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	50.000.000	23.670.100	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	23.670.100	-	APBD
2	8	6	202	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	50.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	-	-	APBD
2	8	6	202	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	50.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 Dokumen	-	-	APBD
2	8	7			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus	23,90%	350.000.000	29.600.000		Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus	23,90%	115.369.000	85.769.000	
2	8	7	201	1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	2 upaya pencegahan	120.000.000	-		Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	2 upaya pencegahan	-	-	
2	8	7	201	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Perangkat Daerah	70.000.000	-	APBD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Perangkat Daerah	-	-	APBD
2	8	7	201	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Dokumen	50.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Dokumen	-	-	APBD
2	8	7	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	30 Orang	60.000.000	-		Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	30 Orang	-	-	
2	8	7	202	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Orang	40.000.000	-	APBD	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Orang	-	-	APBD
2	8	7	202	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	20.000.000	-	APBD	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	-	-	APBD
2	8	7	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	15 Unit layanan PA	170.000.000	29.600.000		Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	15 Unit layanan PA	115.369.000	85.769.000	
2	8	7	203	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	120.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	85.769.000	85.769.000	APBD
2	8	7	203	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Dokumen	50.000.000	29.600.000	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	15 Dokumen	29.600.000	-	APBD
2	14	2			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,92	375.998.000	452.134.000		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,92	452.134.000		
						Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk	100%				Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk	100%			
2	14	2	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	175.000.000	39.934.000		Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	39.934.000	-	
2	14	2	201	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	110.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	-	-	APBD
2	14	2	201	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	3 Satuan Pendidikan	65.000.000	39.934.000	APBD	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	3 Satuan Pendidikan	39.934.000	-	APBD
2	14	2	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	3 Profil KKBPK	200.998.000	412.200.000		Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	3 Profil KKBPK	412.200.000	-	

URUSAN	KODE	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN . SUB KEGIATAN	RENJA 2023					RENJA PERUBAHAN 2023				
							INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SEBELUM PERUBAHAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	RENCANA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 10 - 6	12					
2	14	2	202	2		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	3	75.998.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	3	-	-	APBD
2	14	2	202	11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	13	125.000.000	-	APBD	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	13	-	-	APBD
2	14	2	202	13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	-	412.200.000	DAK	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	412.200.000	-	DAK
2	14	3				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakterlaksanaan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	19,64%	956.000.000	2.559.958.800		Persentase tingkat ketidakterlaksanaan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	19,64%	2.602.856.400	42.897.600	
2	14	3	201			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya	Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	22 Kali	184.000.000	1.619.800.000		Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	22 Kali	1.619.800.000	-	
2	14	3	201	1		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	21	160.000.000	-	APBD	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	21	-	-	APBD
2	14	3	201	2		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	1	-	508.400.000	DAK	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	1	508.400.000	-	DAK
2	14	3	201	4		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	1	24.000.000	156.450.000	APBD+DAK	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	1	156.450.000	-	APBD+DAK
2	14	3	201	6		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	-	249.000.000	DAK	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	249.000.000	-	DAK
2	14	3	201	7		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1	-	625.950.000	DAK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1	625.950.000	-	DAK
2	14	3	201	8		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	-	80.000.000	DAK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	80.000.000	-	DAK
2	14	3	202			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan pergerakan program KKBPK	100%	452.000.000	292.414.800		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan pergerakan program KKBPK	100%	292.414.800	-	
2	14	3	202	3		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	352.000.000	292.414.800	APBD	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	292.414.800	-	APBD
2	14	3	202	4		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	268	100.000.000	-	APBD	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	268	-	-	APBD
2	14	3	203			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	100%	220.000.000	301.416.000		Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	100%	329.703.000	28.287.000	
2	14	3	203	1		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	-	-	DAK	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0	-	-	DAK
2	14	3	203	3		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	-	274.861.000	DAK	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1	274.861.000	-	DAK
2	14	3	203	8		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	160.000.000	26.555.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	54.842.000	28.287.000	APBD
2	14	3	203	9		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	620	60.000.000	-	APBD	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	620	-	-	APBD
2	14	3	204			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	100%	100.000.000	346.328.000		Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	100%	360.938.600	14.610.600	

KODE					RENJA 2023			RENJA PERUBAHAN 2023							
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN. SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SEBELUM PERUBAHAN	SUMBER DANA	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	RENCANA KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
2	14	3	204	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50 Organisasi	50.000.000	11.828.000	APBD	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	50 Organisasi	26.438.600	14.610.600	APBD
2	14	3	204	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	21 Dokumen	50.000.000	-	APBD	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	21 Dokumen	-	-	APBD
2	14	3	204	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kampung KB	21 Kampung	-	334.500.000	DAK	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kampung KB	21 Kampung	334.500.000	-	DAK
2	14	4			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	100%	590.000.000	1.839.583.000		Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	100%	2.262.456.200	422.873.200	
2	14	4	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan FKS	100 Orang	590.000.000	1.839.583.000		Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan FKS	100 Orang	2.262.456.200	422.873.200	
2	14	4	201	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	20 Kelompok	150.000.000	-	APBD	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	20 Kelompok	-	-	APBD
2	14	4	201	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Unit	-	360.000.000	DAK	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Unit	360.000.000	-	DAK
2	14	4	201	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	60.000.000	36.403.000	APBD	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	36.403.000	-	APBD
2	14	4	201	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Orang	-	1.411.200.000	DAK	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Orang	1.693.440.000	282.240.000	DAK
2	14	4	201	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	200.000.000	31.980.000	APBD	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	172.613.200	140.633.200	APBD
2	14	4	201	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	180.000.000	-	APBD	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	-	-	APBD
								10.185.527.750	10.704.199.814				12.904.007.438	2.199.807.624	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah menggambarkan rencana program, sasaran dan kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2023 adalah merupakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut adalah untuk menguraikan target kinerja yang hendak dicapai tahun 2023. Kemudian penyusunan Renja Tahun 2023 ini dibuat dengan telah disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dari permasalahan serta sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang kemudian akan dijabarkan kepada program/kegiatan prioritas dalam hal pendanaannya. Pencapaian target kinerja program tidak hanya didukung dengan pendanaan dari APBD Kabupaten saja, namun pada tahun lalu juga didukung dengan sumber pendanaannya bersumber dari APBN/DAK yaitu untuk mendukung program dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jumlah program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pagu indikatif anggaran APBD Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 10.185.527.750,-

Adapun Rencana Kerjadan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 tertuang pada tabel 4.1 berikut ini:

TABEL 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023		Sumber Dana
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2						
2	08					
2	08	01				
2	08	01	2.01			
2	08	01	2.01	01		
2	08	01	2.01	06		
2	8	1	1.01	7		
2	08	01	2.02			
2	08	01	2.02	01		
2	08	01	2.02	02		
2	08	01	2.02	07		
2	08	01	2.03			
2	08	01	2.03	06		
2	08	01	2.05			
2	08	01	2.05	02		
2	08	01	2.05	04		
2	08	01	2.05	09		
2	08	01	2.06			
2	08	01	2.06	01		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023		Sumber Dana
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 08 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	12 Paket	52.646.000	APBD
2 08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	284 Paket	6.600.000	APBD
2 08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	166 Paket	24.722.775	APBD
2 08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	1 Dokumen	3.600.000	APBD
2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tungkal Ilir	2 Laporan	374.500.000	APBD
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan OPD	Kab. Tanjung Jabung Barat	33 unit/item/set	880.550.000	APBD
2 08 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	5 Unit	100.000.000	APBD
2 08 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	1 Unit	500.000.000	APBD
2 08 01 2.07 05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	20 Unit	55.550.000	APBD
2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	8 Unit	75.000.000	APBD
2 08 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	-	-	APBD
2 08 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	10 Unit	150.000.000	APBD
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	100 Persen	383.750.000	APBD
2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Tungkal Ilir	1 Laporan	2.750.000	APBD
2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	1 Laporan	36.000.000	APBD
2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Tungkal Ilir	1 Laporan	345.000.000	APBD
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Tanjung Jabung Barat	48 unit	172.978.000	APBD
2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Tungkal Ilir	14 Unit	56.654.000	APBD
2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Tungkal Ilir	16 Unit	89.994.000	APBD
2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Tungkal Ilir	17 Unit	11.330.000	APBD
2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Tungkal Ilir	1 Unit	15.000.000	APBD
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	Kab. Tanjung Jabung Barat	10%	659.649.607	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023		Sumber Dana
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 8 2 201	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Lembaga PUG	130.000.000	
2 8 2 201 1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Dokumen	20.000.000	
2 8 2 201 3	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Adipura, Desa Lumahan, Desa Kempas Jaya, desa Talang Makmur, Desa Badang Sepakat	15 Perangkat Daerah	40.000.000	
2 8 2 201 4	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 Perangkat Daerah	70.000.000	
2 8 2 202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Tanjung Jabung Barat	200 orang	479.649.607	
2 8 2 202 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Dokumen	479.649.607	
2 8 2 203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Lembaga Layanan PP	50.000.000	
2 8 2 203 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Desa Adipura, Desa Lumahan, Desa Kempas Jaya, desa Talang Makmur, Desa Badang Sepakat	5 Lembaga	50.000.000	
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan	Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	220.000.000	
2 8 3 201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Jumlah perempuan korban kekerasan	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	
2 8 3 201 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat			
2 8 3 202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Tanjung Jabung Barat	10 Kasus	70.000.000	
2 8 3 202 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 Layanan	70.000.000	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023		Sumber Dana
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 8 3 203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan	Kab. Tanjung Jabung Barat	24 unit layanan	150.000.000	
2 8 3 203 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 orang	100.000.000	
2 8 3 203 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Dokumen	50.000.000	
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga		2%	130.000.000	
2 8 4 201	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	Kab. Tanjung Jabung Barat	200 Keluarga	40.000.000	
2 8 4 201 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Tanjung Jabung Barat	4 Dokumen	40.000.000	
2 8 4 202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah kerjanya dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah pusat pelayanan keluarga	Kab. Tanjung Jabung Barat	5 Pusat Layanan Keluarga	90.000.000	
2 8 4 202 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Desa Adipura, Desa Lumahan, Desa Kempas Jaya, desa Talang Makmur, Desa Badang Sepakat	5 Lembaga	20.000.000	
2 8 4 202 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 orang	70.000.000	
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	20.000.000	
2 8 5 201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Profile Gender	20.000.000	
2 8 5 201 2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	44 Dokumen	20.000.000	
2 8 6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	Kab. Tanjung Jabung Barat	46%	440.000.000	TANJAB BARAT
2 8 6 201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	Kab. Tanjung Jabung Barat	60 Lembaga PHA	240.000.000	Desa/kelur

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023		Sumber Dana
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 8 6 201 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kec.Tungkal Ilir, Kec. Bram Itam, kec. Kuala Betara, kec. batang asam, kec. betara, kec. pengabuan, kec. tungkal ilir, kec. tebing tinggi, kec. merlung, kec. muara papalik, kec. seberang kota, kec. senyerang, kec. tungkal ulu, kec. renah mendaluh, FAD Bram Itam, FAD Kuala Betara, FAD batang asam, FAD betara, FAD pengabuan, FAD tungkal ilir, FAD tebing tinggi, FAD merlung, FAD muara papalik, FAD seberang kota, FAD senyerang, FAD tungkal ulu, FAD renah mendaluh, Desa Bram Itam Raya, Desa Kemuning, Desa Betara Kanan, Desa Sungai Dualap, Desa Lubuk Bernai, Desa Suban, Desa Serdang Jaya, Desa Pematang Buluh, Desa Sungai Pampang, Desa Sungai Baung, Desa Teluk Sialang, Kelurahan Tungkal II, Kelurahan Tungkal III, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kelurahan Kampung Nelayan, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Patunas, Kelurahan Tungkal Harapan, Desa Purwodadi, Desa Delima, Desa Tanjung Paku, Desa Merlung, Desa Pinang Gading, Dusun Mudo, Desa Lubuk Sebondan, Desa Kuala Kahar, Desa Mekar Alam, desa sungai kayu aro, desa sungai landak, desa pematang pauh, desa gemuruh, desa lamjosi, desa pulau pauh	35 <i>Organisasi</i>	110.000.000	Desa/kelurahan
2 8 6 201 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jakarta, Provinsi Jambi, desa pantai gading, desa sungai gebar, desa sri agung, desa sungai keruh, desa penyabungan, desa kemang manis, desa kuala baru, desa pematang tembesu, desa rantau benar.	5 Dokumen	130.000.000	Kab/pro/pusat
2 8 6 202	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan</i>	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 <i>Sekolah</i>	200.000.000	Kecamatan
2 8 6 202 1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	SDN 1/V Kuala Tungkal, SDN 2/V Kuala Tungkal, SDN 3/V Kuala Tungkal, SDN 9/V Pelabuhan Dagang, SDN 17/V Kuala Tungkal, SDN 19/V Teluk Nilau, SDN 23/V Tebing Tinggi, SDN 36/V Bram Itam, SDN 60/V Parit Panglong, SDN 92/V Gemuruh, SDN 120/V Kuala Tungkal, SMPN 2 Kuala Tungkal, SMPN 3 Kuala Tungkal, SMPN 1 Pengabuan, SMPN 1 Betara, SMPN 3 Tungkal Ulu, SMPN 5 Tungkal Ulu, SMPN 4 Tungkal Ulu, SMPN 5 Kuala Tungkal, SMPN 3 Merlung, SMPN 6 Merlung, SMPN 7 Merlung, SDN 160/V Bukit Harapan, SDN 174/V Intan Jaya, SMPN 4 Kuala Tungkal, SDN 28/V Bram Itam Kanan, SDN 4/V Kuala Tungkal, SDN 157/V Kuala Tungkal, MTSN 2 Tanjung Jabung Barat, MTSN 1 Tanjung Jabung Barat	6000 Orang	50.000.000	Kecamatan
2 8 6 202 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	SDN 1/V Kuala Tungkal, SDN 2/V Kuala Tungkal, SDN 3/V Kuala Tungkal, SDN 9/V Pelabuhan Dagang, SDN 17/V Kuala Tungkal, SDN 19/V Teluk Nilau, SDN 23/V Tebing Tinggi, SDN 36/V Bram Itam, SDN 60/V Parit Panglong, SDN 92/V Gemuruh, SDN 120/V Kuala Tungkal, SMPN 2 Kuala Tungkal, SMPN 3 Kuala Tungkal, SMPN 1 Pengabuan, SMPN 1 Betara, SMPN 3 Tungkal Ulu, SMPN 5 Tungkal Ulu, SMPN 4 Tungkal Ulu, SMPN 5 Kuala Tungkal, SMPN 3 Merlung, SMPN 6 Merlung, SMPN 7 Merlung, SDN 160/V Bukit Harapan, SDN 174/V Intan Jaya, SMPN 4 Kuala Tungkal, SDN 28/V Bram Itam Kanan, SDN 4/V Kuala Tungkal, SDN 157/V Kuala Tungkal, MTSN 2 Tanjung Jabung Barat, MTSN 1 Tanjung Jabung Barat	20 Dokumen	50.000.000	
2 8 6 202 3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	50.000.000	Tanjung Jabung Barat
2 8 6 202 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Tanjung Jabung Barat (Dinas kesehatan, Dinas pendidikan,BPBD, BLH dan Ism MPC)	3 Dokumen	50.000.000	Tanjung Jabung Barat

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023		Sumber Dana
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 8 7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus	Kab. Tanjung Jabung Barat	23,9%	350.000.000	Tanjab Barat
2 8 7 201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Kab. Tanjung Jabung Barat	6 upaya pencegahan	120.000.000	Tanjab Barat
2 8 7 201 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab.Tanjab Barat, Kelurahan Tungkal Harapan, Kelurahan Kampung nelayan, Desa Makmur Jaya, Desa Sungai Terap, Kelurahan Rantau Badak, Desa Mandala Jaya, Desa Margo Rukun, Desa Teluk Sialang, Desa Kelagian, Desa Sungsang, Desa Sungai Serindit, Desa Teluk Pengkah, Desa Mekar Alam, Desa Sungai Rambai, Kelurahan Patunas, Kelurahan Sungai Nibung, Kelurahan Tungkal II, Kelurahan Betara Kiri, Desa Karya Maju	10 Perangkat Daerah	70.000.000	Tanjung Jabung Barat
2 8 7 201 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Polres Kab.Tanjab Barat, Dinas Sosial, Kec.Tungkal Ilir, Kec. Bram Itam, Kec.Seberang Kota, Kec.Kuala Betara, Kec.Betara, Kec.Pengabuan, Kec.Tebing Tinggi, Kec.Merlung, Kec.Muara Papalik, Kecamatan Tungkal Ulu, Kec.Renah Mendaluh, Kec. Batang Asam, Kec.Senyerang,UPTD PPA,Alyatama Jambi, DP3AP2 Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Satpol PP	15 Dokumen	50.000.000	Desa/kelurahan
2 8 7 202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	Kab. Tanjung Jabung Barat	32 Orang	60.000.000	Tanjung Jabung Barat
2 8 7 202 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 Orang	40.000.000	Tanjung Jabung Barat
2 8 7 202 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Tanjung Jabung Barat	30 Layanan	20.000.000	Tanjung Jabung Barat
2 8 7 203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kab. Tanjung Jabung Barat	15 Unit layanan PA	170.000.000	Tanjung Jabung Barat
2 8 7 203 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kel.Kampung Nelayan, Kel.Tungkal II, Desa Lubuk Terentang, Desa Delima, Desa Talang Makmur, Kelurahan Dusun Kebun, Desa Tanjung Pinang, Desa Sungai Pampang, Desa Suak Samin, Desa Sungai Serindit, Desa Lubuk Terentang, Desa Pematang Lumut, Desa Kuala Indah, Desa Brasau dan Desa Kemuning	2 Dokumen	120.000.000	Tanjung Jabung Barat
2 8 7 203 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kel.Kampung Nelayan, Kel.Tungkal II, Desa Lubuk Terentang, Desa Delima, Desa Talang Makmur, Kelurahan Dusun Kebun, Desa Tanjung Pinang, Desa Sungai Pampang, Desa Suak Samin, Desa Sungai Serindit, Desa Lubuk Terentang, Desa Pematang Lumut, Desa Kuala Indah, Desa Brasau dan Desa Kemuning	15 Dokumen	50.000.000	Desa/kelurahan
2 14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2 14 2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,92	80.000.000	Tanjab Barat
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk		100%		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023		Sumber Dana
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 14 2 201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	30.000.000	Tanjab Barat
2 14 2 201 9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	SLTP Kec. Muara Papalik, SLTP Kec. Batang Asam SLTP Kec. Renah Mendaluh	3 Satuan Pendidikan	30.000.000	Tanjab Barat
2 14 2 202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	Kab. Tanjung Jabung Barat	3 Profil KKBPK	50.000.000	Tanjab Barat
2 14 2 202 2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kec. Tungal Ulu, Kec. Tungal Ilir, Kec. Pengabuan, Kec. Betara, Kec. Merlung, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Batang Asam, Kec. Renah Mendaluh, Kec. Muara Papalik, Kec. Seberang Kota, Kec. Bram Itam, Kec. Kuala Betara, Kec. Senyerang	1 Dokumen	25.000.000	Tanjab Barat
2 14 2 202 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kec. Tungal Ulu, Kec. Tungal Ilir, Kec. Pengabuan, Kec. Betara, Kec. Merlung, Kec. Tebing Tinggi, Kec. Batang Asam, Kec. Renah Mendaluh, Kec. Muara Papalik, Kec. Seberang Kota, Kec. Bram Itam, Kec. Kuala Betara, Kec. Senyerang	1 Dokumen	25.000.000	Tanjab Barat
2 14 3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	Kab. Tanjung Jabung Barat	19,64%	1.458.000.000	Tanjab Barat
2 14 3 201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE	Kec.Tkl.Iilir(Kel.Tkl.Harapan &Kmpng Nelayan), Kec. Tkl. Ulu(Desa Taman Raja), Kec.Pengabuan(Desa Parit Pudin dan Pasar Senen), Kec.Betara(Desa Teluk Kulbi dan desa Bunga Tanjung), Kec.Merlung(Desa Tanjung Paku), Kec.Tebing Tinggi(Desa Dataran Kempas), Kec. Batang Asam(Desa Rawa Medang), Kec.Renah Mendaluh(Desa Pulau Pauh dan desa Tanah Tumbuh), Kec.Muara Papalik(Desa Rantau Badak dan Desa Lubuk Sebonlan), Kec.Seberang Kota(Desa Muara Seberang), Kec.Bram Itam(Desa Jati Emas dan Desa Kemuning), Kec.Kuala Betara(Desa Betara Kiri dan Desa Sungai Gebar), Kec.Senyerang(Desa margo Rukun dan Desa Sungai Landak).	22 Kali	84.000.000	Tanjab
2 14 3 201 1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi	Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Organisasi	60.000.000	Tanjab
2 14 3 201 4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program	Kec.Tkl.Iilir(Kel.Tkl.Harapan &Kmpng Nelayan), Kec. Tkl. Ulu(Desa Taman Raja), Kec.Pengabuan(Desa Parit Pudin dan Pasar Senen), Kec.Betara(Desa Teluk Kulbi dan desa Bunga Tanjung), Kec.Merlung(Desa Tanjung Paku), Kec.Tebing Tinggi(Desa Dataran Kempas), Kec. Batang Asam(Desa Rawa Medang), Kec.Renah Mendaluh(Desa Pulau Pauh dan desa Tanah Tumbuh), Kec.Muara Papalik(Desa Rantau Badak dan Desa Lubuk Sebonlan), Kec.Seberang Kota(Desa Muara Seberang), Kec.Bram Itam(Desa Jati Emas dan Desa Kemuning), Kec.Kuala Betara(Desa Betara Kiri dan Desa Sungai Gebar), Kec.Senyerang(Desa margo Rukun dan Desa Sungai Landak).	1 Dokumen	24.000.000	Tanjab
2 14 3 202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan penggerakan program KKBPK	Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	1.154.000.000	Tanjab Barat
2 14 3 202 3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Tanjung Jabung Barat	2 Laporan	1.099.000.000	Tanjab Barat

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023		Sumber Dana
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 14 3 202 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Tanjung Jabung Barat	50 orang	55.000.000	Tanjung Barat
2 14 3 203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kab. Tanjung Jabung Barat	20%	120.000.000	
2 14 3 203 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13 Kecamatan (Tungkal Ilir, Betara, Kuala Betara, Bram Itam, Seberang Kota, Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ulu, Tebing Tinggi, Batang Asam, Muara Papalik, Rendah Mendaluh)	12 Laporan	60.000.000	Tanjung Barat
2 14 3 203 9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	13 Kecamatan (Tungkal Ilir, Betara, Kuala Betara, Bram Itam, Seberang Kota, Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ulu, Tebing Tinggi, Batang Asam, Muara Papalik, Rendah Mendaluh)	620 Orang	60.000.000	Tanjung
2 14 3 204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	100.000.000	Tanjung Barat
2 14 3 204 1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	13 Camat Kab. Tanjung Jabung Barat, Kepala Puskesmas Kuala Tungkal I, Kepala Puskesmas Kuala Tungkal II, Kepala Puskesmas Sungai Saren, Kepala Puskesmas Tungkal V, Kepala Puskesmas Kartika Yudha/Teluk Nilau, Kepala Puskesmas Pondok Indah, Kepala Puskesmas Merlung, Kepala Puskesmas Parit Deli, Kepala Puskesmas Sukorejo, Kepala Puskesmas Rantau Badak, Kepala Puskesmas Bukit Indah, Kepala Puskesmas Lubuk Kambing, Kepala Puskesmas Suban, Kepala Puskesmas Pelabuhan Dagang, Kepala Puskesmas Purwodadi, Kepala Puskesmas Pijoan Baru, Kapolres Tanjung Barat, Dandim 0419/Tanjung, RSUD KH. Daud Arif Kuala Tungkal, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Barat, Kepala Dinas Pendidikan, Bagian AKRK Setda Kab. Tanjung Barat, Kemenag Kab. Tanjung Barat, TP.PKK Kab. Tanjung Barat, IBI Kab. Tanjung Barat, MUI Kab. Tanjung Barat, NU Kab. Tanjung Barat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Forum GenRe Kab. Tanjung Barat, BKMT Kab. Tanjung Barat, Ketua Ipe Kh Kab. Tanjung Barat	50 Organisasi	50.000.000	Tanjung Barat
2 14 3 204 2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kel. Tungkal Harapan, Kel. Kampung Nelayan, Desa Muara Seberang, Kel. Betara Kiri, Desa Sungai Gebar, Desa Bunga Tanjung, Desa Teluk Kulbi, Desa Rawa Medang, Desa Kemuning, Desa Jati Emas, Desa Taman Raja, Desa Pasar Senin, Desa Parit Pudin, Kel. Rantau Badak, Desa Lubuk Sebantun, Desa Sungai Landak, Desa Margo Rukun, Desa Tanjung Paku, Desa Dataran Kempas, Desa Tanah Tumbuh, Desa Pulau Pauh	21 Dokumen	50.000.000	Tanjung Barat
2 14 4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	Kab. Tanjung Jabung Barat	100%	590.000.000	Tanjung Barat
2 14 4 201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS	BKB (Tungkal II, Bram Itam Raya, Betara Kanan, Senyerang, Teluk Pulau Raya, Mekar Jaya, Pinang Gading, Cinta Damai, Teluk Nilau, Purwodadi), BKR (Tungkal II, Bram Itam Raya, Betara Kanan, Senyerang, Teluk Pulau Raya, Mekar Jaya, Pinang Gading, Cinta Damai, Teluk Nilau, Purwodadi), BKL (Tungkal II, Bram Itam Raya, Betara Kanan, Senyerang, Teluk Pulau Raya, Mekar Jaya, Pinang Gading, Cinta Damai, Teluk Nilau, Purwodadi), PIK-R (Tungkal II, Tungkal Harapan, Bram Itam Raya, Betara Kanan, Senyerang, S.Landak, Teluk Pulau Raya, Bunga Tanjung, Mekar Jaya, Pinang Gading, Tanjung Benanak, Cinta Damai, S. Paur, Teluk Nilau, Purwodadi, Dataran Kempas, Rantau Benar, Kampung Nelayan, Pembengis, Kuala Indah)	21 Poktan	590.000.000	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI KEGIATAN	RENCANA KERJA TAHUN 2023		Sumber Dana
				Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 14 4 201 1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Tanah Tumbuh, S. Paur, Bram Itam Raya, Semau, Tungkal Ulu, Badang Sepakat, Taman Raja, Kelurahan Merlung, Parit Pudin, Pasar Senin, Taman Raja, Tebing Tinggi, Suban, Mekar Tanjung, Teluk Kempas, Tanjung Pasir, Tungkal II, Bukit Harapan, rawa medang, pelabuhan dagang.	20 Kelompok	150.000.000	
2 14 4 201 3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kecamatan Tungkal Ilir	2 Laporan	60.000.000	Tanjab Barat
2 14 4 201 6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kecamatan Tungkal Ilir	1 Kelompok	200.000.000	Tanjab Barat
2 14 4 201 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tungkal II, Bram Itam Raya, Belara Kanan, Senyerang, Teluk Pulau Raya, Mekar Jaya, Pinang Gading, Cinta Damai, Teluk Nilau, Purwodadi, Kuala Kahar, sungai gebar, sungai landak, serdang jaya, Taman raja	1 Laporan	180.000.000	Tanjab Barat
					10.185.527.750	

